

ANALISIS KONTRIBUSI SERTA PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

CONTRIBUTION ANALYSIS AND INFLUENCES OF GENERAL ALLOCATION FUNDS (GAF) TO THE EXPENDITURES DISTRICT SANGIHE ISLAND

Naydy Samau¹, Vekie Rumat², Albert T Londa³

*^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi Manado 95115, Indonesia
Email: ¹ naydy.samau@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Dana Alokasi Umum (DAU) sangat diperlukan untuk pemerataan kemampuan keuangan dan untuk menutupi celah fiskal antar daerah. Namun apabila penerimaan DAU di suatu daerah tiap tahunnya selalu meningkat akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung dengan transfer pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi serta pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2005-2014 dan menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe masih sangat bergantung dengan transfer pemerintah pusat. Akan tetapi ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tiap tahunnya semakin berkurang. Hasil analisis regresi sederhana membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Pegawai dan DAU juga berpengaruh positif terhadap Belanja Modal akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Kata Kunci: DAU, Belanja Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai

ABSTRACT

The General Allocation Fund (GAF) is necessary to ensure equity and financial ability to cover the fiscal gap between regions. However, if the GAF in the region each year will show that local governments are very dependent on central government transfers. The purpose of this study was to determine the contribution and influence of GAF to Regional Expenditures District Sangihe Islands. This study uses secondary data years 2005-2014 and using descriptive analysis and simple regression analysis. The results showed that the Sangihe Islands Regency is still very dependent on central government transfers. But the reliance on local government district Sangihe Islands each year decreases. The results of a simple regression analysis proved that GAF positive and significant impact on personnel expenditures and GAF also a positive influence on the Capital Expenditure but the effect is not statistically significant.

Keywords: DAU, Regional Expenditures, Capital Expenditure, and Personnel Expenditures

1. PENDAHULUAN

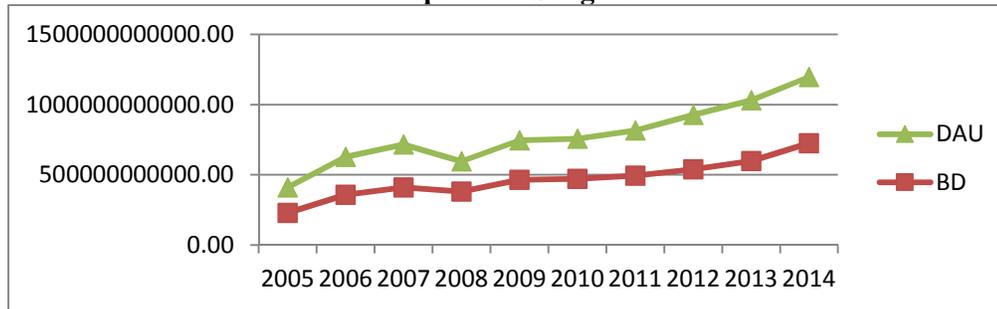
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat Block Grant dimana kepada daerah penerima DAU diberi kewenangan dan keleluasan dalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Penerimaan DAU digunakan untuk mendanai belanja daerah yaitu belanja langsung dan tidak langsung atau belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2013 bahwa Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi peningkatan transfer pemerintah pusat melalui DAU sangat diperlukan untuk pemerataan kemampuan keuangan dan untuk menutupi celah fiskal antar daerah. Namun apabila penerimaan DAU di suatu daerah tiap tahunnya selalu meningkat atau dengan kata lain transfer pemerintah pusat tidak berkurang akan memberikan pengaruh terhadap suatu daerah dimana semakin tinggi DAU akan meunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat bergantung dengan transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu dengan berjalannya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan DAU yang merupakan transfer dari pemerintah pusat akan berkurang dan diharapkan dalam pelaksanaan otonomi daerah pendapatan lokal atau Pendapatan Asli Daerah bisa memberikan sumbangan terbesar dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk salah satu daerah otonom yang berarti bahwa pemerintah daerah dan masyarakatnya diberikan kewenangan dan tanggungjawab dalam mengelola pembangunan di daerah. Dalam kegiatan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe DAU yang diberikan pemerintah pusat setiap tahunnya merupakan sumber pendanaan yang paling besar. Hal ini dibuktikan melalui penerimaan transfer pemerintah pusat khususnya DAU tiap tahunnya terjadi peningkatan. Keadaan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe masih sangat bergantung dengan transfer pemerintah pusat. Dibawah ini gambar 1.1 menunjukkan perkembangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Gambar 1.1
Grafik Perkembangan Belanja Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Sangihe



Gambar 1.1 menunjukkan bahwa peningkatan DAU di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan diikuti dengan peningkatan Belanja Daerah. Dimana pada tahun 2005-2007 DAU mengalami peningkatan yang tajam dan peningkatan ini diikuti dengan peningkatan belanja daerah. Kemudian pada tahun 2008 penerimaan DAU turun sehingga mengalami penurunan di sisi belanja daerah. Dan pada tahun 2009-2014 penerimaan DAU mengalami peningkatan sehingga berpengaruh pada peningkatan belanja daerah. Hal ini membuktikan bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sumber pendanaannya masih sangat bergantung dengan transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengelolah potensi daerah yang bisa meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerahnya sehingga dengan meningkatnya pendapatan lokal daerah bisa mengurangi ketergantungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terhadap pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya suatu penelitian yang bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga pemerintah daerah lebih meningkatkan pendapatan yang berasal dari daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini yang melatar belakangi penelitian ini dengan judul: “Analisis Kontribusi Serta Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi serta pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti lainnya, apabila penelitian ini dilanjutkan diharapkan bisa memberikan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dikemudian hari.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe diharapkan dengan penelitian ini akan membuka wawasan baru tentang kontribusi serta pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah sehingga dapat digunakan sebagai masukan dan saran untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan dalam program pemerintah selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

Otonomi Daerah

Menurut UU No 32 Tahun 2004 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut UU No 33 Tahun 2004 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut (Afifuddin, 2010:141-144) Otonomi daerah memiliki sejumlah kewenangan dan strategi dalam memajukan daerah. Semua aturan yang ada di daerah harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi kedudukannya.

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketergantungan Fiskal

Realitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (*grants*) yang didrop dari pemerintah pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan Daerah. Apabila bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat lebih mendominasi pembiayaan pembangunan daerah dibandingkan dengan PAD dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah berdasarkan indikator desentralisasi fiskal masih kecil (Mudrajat Kuncoro, 2004:8-10).

Dana Alokasi Umum

Diterapkannya UU No. 33 Tahun 2004 memiliki dampak atau implikasi yang cukup besar terhadap perekonomian daerah pada umumnya. Salah satunya dengan adanya dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Melalui kebijakan bagi hasil sumber daya alam diharapkan daerah dan masyarakat setempat dapat lebih merasakan hasil dari sumber daya alam yang dimiliki. Karena selama ini hasil sumber daya alam lebih banyak dinikmati oleh pemerintah pusat dibandingkan masyarakat setempat. Bagi Hasil Sumber Daya Alam ditujukan untuk mengurangi ketimpangan vertikal (*Vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, sedangkan DAU untuk mengurangi ketimpangan Horizontal (*Horizontal imbalance*) antar daerah.

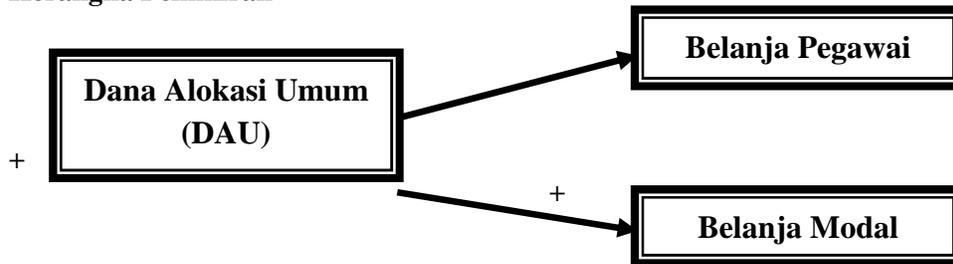
Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana alokasi umum hanya terdiri dari obyek pendapatan dana alokasi umum. Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan

secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian layanan umum. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja (Rudy Badrudin, 2012:51).

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan variabel kuantitatif. variabel kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. (Lind, et al. 2007:9-10).

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series periode tahun 2005-2014. Data yang digunakan meliputi : data Belanja Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Kepulauan Sangihe.

'Defenisi Pengukuran Variabel

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan variabel terikat adalah Belanja Daerah. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana alokasi umum hanya terdiri dari obyek pendapatan dana alokasi umum.

Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian layanan umum.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai di Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dan pegawai honorer yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Modal

Belanja modal Kabupaten Kepulauan Sangihe digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai dan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data-data yang diperoleh menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi sederhana.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan suatu data yang akan dibuat baik sendiri maupun secara kelompok. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, serta menganalisis perkembangan realisasi belanja pegawai dan belanja modal Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Regresi Sederhana

Regresi atau peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya dapat diperkecil.

Analisis regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah (Belanja Pegawai dan Belanja Modal). Persamaan regresi sederhana dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e \tag{1}$$

- Dimana : Y = Subyek variabel terikat yang di proyeksikan
- X = Variabel bebas
- a = Nilai konstanta harga Y jika $X = 0$
- b = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi)
- e = Error term

Dalam penelitian ini persamaan regresi sederhana dirumuskan sebagai berikut:

$$BP = a + bDAU + e \tag{2}$$

$$BM = a + bDAU + e \tag{3}$$

- Dimana : BP = Belanja Pegawai
- BM = Belanja Modal, dan
- DAU= Dana Alokasi Umum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1
Kontribusi DAU, PAD, DAK, DBH, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (%)

Tahun	Presentase DAU	Presentase PAD	Presentase DBH	Presentase DAK	Presentase Lain-lain
2005	79.87	5.39	6.97	7.98	10.21
2006	74.92	4.66	5.63	11.79	0.34
2007	74.84	4.78	4.52	13.11	5.76
2008	55.96	4.49	3.97	18.59	10.75
2009	60.35	5.36	3.26	22.53	3.13
2010	60.71	5.04	3.62	12.00	22.75
2011	65.25	5.77	2.61	12.29	17.08
2012	72.06	5.28	3.12	11.23	7.24
2013	72.43	5.37	2.51	14.24	8.89
2014	65.08	7.20	1.51	16.70	9.86

Sumber Data: Data Diolah di Excel (2016)

Hasil analisis kontribusi DAU terhadap belanja daerah pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai terendah kontribusi DAU terhadap Belanja Daerah pada tahun 2008 yaitu sebesar 55,96%, dan nilai tertinggi kontribusi DAU terhadap Belanja Daerah yaitu pada tahun 2005 sebesar 79,87%. Rata rata kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2005 2014 adalah sebesar 68,14%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sangihe 68,14% dibiayai oleh DAU dan sisanya 5,33% dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), 3,77% dibiayai oleh Dana Bagi Hasil (DBH), 14,05 dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 9,60% dibiayai oleh Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Akan tetapi kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) semakin berkurang tiap tahunnya.

Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Tabel 2

Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Tahun	RDDF	RKKD	RKMD
2005	4.88	85.87	5.69
2006	4.79	94.86	5.05
2007	4.65	89.76	5.18
2008	4.79	83.74	5.72
2009	5.67	91.03	6.23
2010	4.84	73.31	6.60
2011	5.61	77.81	7.21
2012	5.34	87.34	6.12
2013	5.2	86.21	6.03
2014	7.17	83.00	8.64

Sumber Data: Data Diolah di Excel (2016)

Berdasarkan tabel 2 Perkembangan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Di atas maka dapat dibuat interpretasi sebagai berikut:

- Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi di Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin baik tiap tahunnya. Dimana rasio derajat desentralisasi tahun 2005 sebesar 4.88% dan pada tahun 2014 naik sebesar 7.17%. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam membiayai pelaksanaan Desentralisasi semakin meningkat tiap tahunnya..
- Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat tergantung dengan transfer pemerintah pusat. Dimana rasio ketergantungan diatas 70% dengan rasio terendah pada tahun 2010 yaitu sebesar 73.31% dan rasio tertinggi pada tahun 2006 yaitu 94.86%.
- Rasio Kemandirian Daerah (RKMD) menunjukkan bahwa kemandirian daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin meningkat tiap tahunnya. Dimana rasio kemandirian mulai tahun 2005-2011 mengalami peningkatan hingga 7.21%, akan tetapi tahun 2012-2013 turun menjadi 6.03% dan kemudian pada tahun 2014 meningkat hingga 8,64%. Meskipun rasio kemandirian daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe meningkat tiap tahunnya namun peningkatannya masih sangat kurang baik dimana peningkatannya dibawah 10%.

**Hasil Estimasi Regresi Sederhana
Alokasi Belanja Pegawai**

Tabel 4

Hasil Estimasi Regresi Sederhana Pengaruh DAU Terhadap Belanja Pegawai

Variabel	Coefficient	t Statistik	Probabilitas
C	6.122396	1.413232	0.1953
LND AU	1.221604***	7.455473	0.0001
R ² = 0.874182			

Sumber Data : Output Eviews diolah (2016)

- Keterangan : ***) signifikan pada = 1%
 **) signifikan pada = 5%
 *) signifikan pada = 10%

Berdasarkan data dalam tabel hasil estimasi regresi sederhana tersebut maka dapat dibuat interpretasi sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 6.122396 artinya jika Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0 maka besarnya Belanja Pegawai Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah 6.122396.
- b. DAU mempunyai nilai koefisien sebesar 1.2216 yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Pegawai Kabupaten Kepulauan Sangihe. Artinya apabila DAU naik sebesar Rp.1 maka Belanja Pegawai di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan naik sebesar 1.2216%.

Alokasi Belanja Modal

Tabel 5
Hasil Estimasi Regresi Sederhana Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

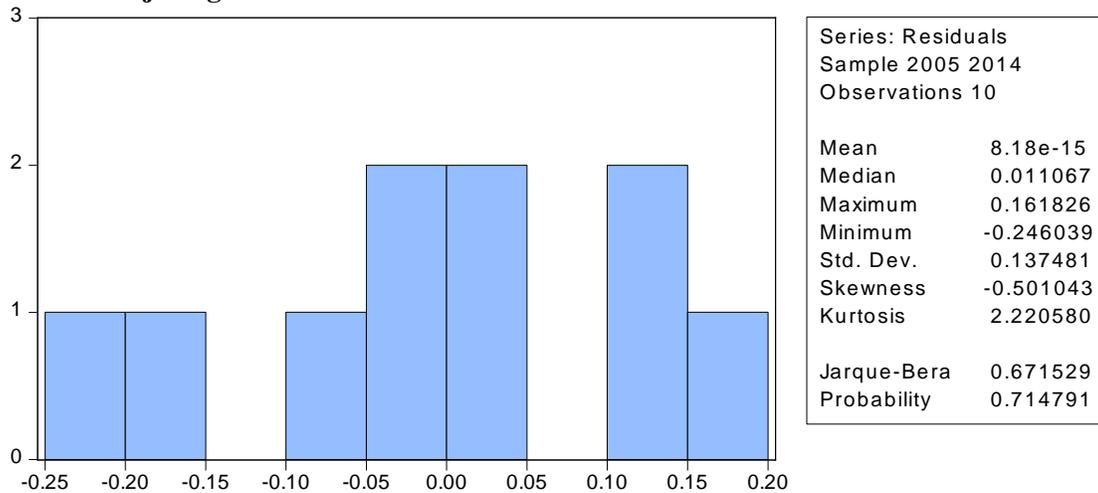
Variabel	Coefficient	t Statistik	Probabilitas
C	11.79781	1.258910	0.2436
LND AU	0.515199	1.453521	0.1842
R ² = 0.866162			

Sumber Data : Output Eviews diolah (2016)

Berdasarkan data dalam tabel hasil estimasi regresi sederhana tersebut maka dapat dibuat interpretasi sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta sebesar 11.79781 artinya jika Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 0 maka besarnya Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah 11.79781.
- b. DAU mempunyai nilai koefisien sebesar 0.515 yang berarti bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Sangihe. Artinya apabila DAU naik sebesar Rp.1 maka Belanja Modal di Kabupaten Kepulauan Sangihe akan naik sebesar 0.515%.

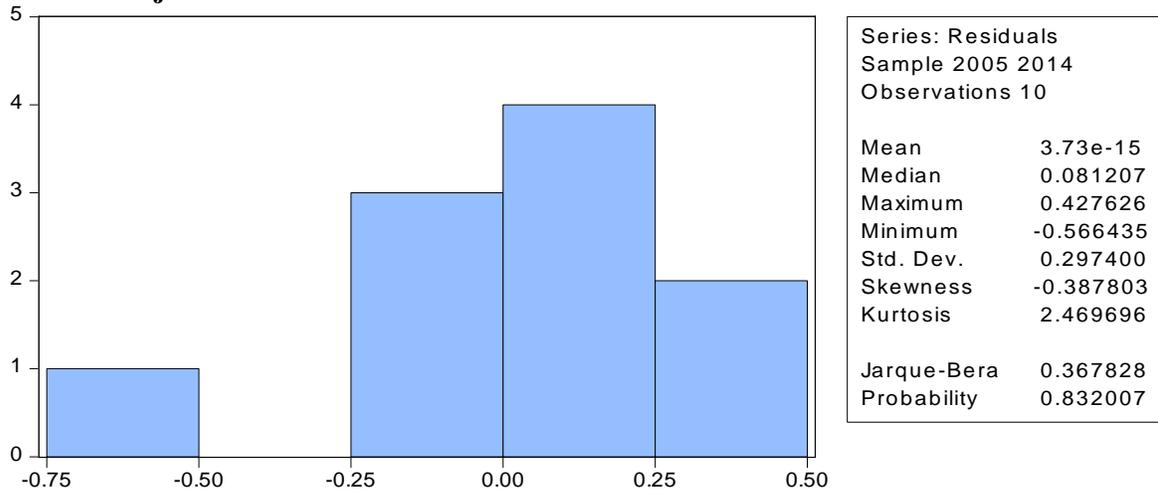
Uji Asumsi Klasik Normalitas Alokasi Belanja Pegawai



Gambar 1 Hasil Uji Normalitas Pengaruh DAU Terhadap Belanja Pegawai

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 1 diperoleh nilai statistik JB sebesar 0.6715 sedangkan nilai Chi Squares dengan $\alpha = 5\%$ dan $df = 2$ sebesar 5.99. Maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal.

**Uji Asumsi Klasik Normalitas
Alokasi Belanja Modal**



Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji normalitas pada gambar 2 diperoleh nilai statistik JB sebesar 0.3678 sedangkan nilai Chi Squares dengan $\alpha = 5\%$ dan $df = 2$ sebesar 5.99. Maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal.

**Uji Asumsi Klasik Autokorelasi
Alokasi Belanja Pegawai**

Hasil uji autokoresali pengaruh DAU terhadap belanja pegawai dengan metode LM (*Lagrange Multiplier*) menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6

$R^2 = 0.239886$
Obs*R-squared = 2.398864
Chi-squares pada $\alpha = 5\%$ = 5.99
Probabilitas Chi Squares = 0.3014

Sumber Data : Output Eviews diolah (2016)

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.239886. Nilai chi squares hitung (χ^2) sebesar 2.398864 diperoleh dari informasi Obs*R squared yaitu jumlah observasi dikalikan dengan koefisien determinasi. Sedangkan nilai χ^2 kritis dengan $df = 2$ pada $\alpha = 5\%$ sebesar 5.99. Berdasarkan uji LM ini nilai chi-squares hitung lebih kecil dari nilai kritisnya berarti model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Alokasi Belanja Modal

Hasil uji autokoresali pengaruh DAU terhadap belanja modal dengan metode LM (*Lagrange Multiplier*) menunjukkan hasil sebagaimana terdapat pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7

$R^2 = 0.095812$
Obs*R-squared = 0.958115
Chi-squares pada $\alpha = 5\%$ =
Probabilitas Chi Squares = 0.6194

Sumber Data : Output Eviews diolah (2016)

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.095812. Nilai chi squares hitung (χ^2) sebesar 0.958115 diperoleh dari informasi Obs*R squared yaitu jumlah observasi

dikalikan dengan koefisien determinasi. Sedangkan nilai x^2 kritis dengan $df = 2$ pada $\alpha = 5\%$ sebesar 5.99. Berdasarkan uji LM ini nilai chi-squares hitung lebih kecil dari nilai kritisnya berarti model tidak mengandung masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis (Uji t)

Alokasi Belanja Pegawai

Berdasarkan data dalam tabel 4 menunjukkan bahwa nilai t statistik diperoleh $(7.455) >$ dari nilai t tabel (3.355) pada $\alpha = 1\% / 2 (0.005)$ dengan $df = 8$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya secara statistik variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU) signifikan mempengaruhi variabel dependen Belanja Pegawai. Pengaruh tersebut signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99%. Selain itu nilai probabilitas hitung diperoleh sebesar $0.0001 < 1\% (0.01)$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Pegawai Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan nilai t statistik diperoleh $(1.4535) <$ dari nilai t tabel (2.306) pada $\alpha = 5\% / 2 (0.025\%)$ dan (1.860) pada $\alpha = 10\% / 2 (0.05)$ dengan $df = 8$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya secara statistik variabel independen Dana Alokasi Umum (DAU) tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen Belanja Modal. Selain itu nilai probabilitas hitung diperoleh sebesar $0.1842 > 5\% (0.025\%)$ dan $10\% (0.1)$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Koefisien Determinasi

Alokasi Belanja Pegawai

Berdasarkan data dalam tabel 4 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.874. Artinya variasi Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi Belanja Pegawai Kabupaten Kepulauan Sangihe dijelaskan oleh model sebesar 87.4% dan sisanya 12.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan data dalam tabel 5 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.2089. Artinya variasi Dana Alokasi Umum (DAU) mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten Kepulauan Sangihe dijelaskan oleh model sebesar 20.89% dan sisanya 79.11% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kegiatan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe 68,14% dibiayai oleh Dana Alokasi Umum (DAU), akan tetapi kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) semakin berkurang tiap tahunnya. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin meningkat tiap tahunnya, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe masih sangat tergantung dengan transfer pemerintah pusat namun selama 3 tahun terakhir ketergantungan pemerintah berkurang tiap tahunnya, Kemandirian daerah meningkat tiap tahunnya akan tetapi peningkatannya masih sangat kurang baik dibawah 10%.

2. Hasil analisis regresi sederhana membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Pegawai. Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh positif terhadap Belanja Modal akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Saran

1. Pendapatan yang berasal dari daerah sendiri harus ditingkatkan agar kemampuan keuangan daerah semakin baik tiap tahunnya, ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin berkurang tiap tahunnya, dan kemandirian daerah akan meningkat ke level yang lebih baik. Selain itu dalam pelaksanaan kebijakan di kabupaten Kepulauan Sangihe Pemerintah Daerah harus meningkatkan Belanja Modal sehingga dengan peningkatan Belanja Modal akan terjadi aktivitas ekonomi yang akan membentuk nilai absolute Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan nilai relative perubahan PDRB yang disebut dengan Pertumbuhan Ekonomi.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel dan menambah periode penelitian agar hasil penelitian bisa lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afifuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan. Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabet
- [2] Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- [3] Departemen Keuangan. 2008. *Pelengkap Buku Pegangan 2008 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Departemen Keuangan Indonesia
- [4] Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- [5] Lind, Marchal dan Wathen. 2007. *Teknik-teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- [6] Natawiria, Asep Suryana dan Riduan. 2010. *Statistika Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- [7] Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*: http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah.pdf
- [8] Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*: http://e-keuangan.riau.go.id:88/doc/UU_33_Tahun_2004.pdf
- [9] Republik Indonesia. 2013. *Undang Undang, Permendagri Nomor 19 & 16 Tentang APBN & APBD Tahun dan Perpres Nomor 10 Tentang Dana Alokasi Umum Provinsi Kabupaten/Kota Tahun* . Jakarta: PT.Tamita Utama
- [10] Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN